

JOURNAL

**KEBIJAKAN BANTUAN LUAR NEGERI AUSTRALIA KE INDONESIA  
TAHUN 2012 - 2013**

**( The Australia's Foreign Aid Policy for Indonesia 2012 -2013 )**

NOVIA TITI SARASWATI

[noviatitisaraswati@gmail.com](mailto:noviatitisaraswati@gmail.com)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI Dr. Nur Azizah, M.Si

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**ABSTRAK**

*This paper aims to describe how international context influence domestic politic and economic – military condition. Then, the factor will influence decision maker. In this paper using case the Australian Government changed foreign aid policy for Indonesia since 2012 until 2013. Indonesia is strategic partner for Australia , but their relation have fluktuasion. Fluklutuasion relation happened because both of the country have different ideology , culture and norms. In other side , Australia has interaction with some country that have problems. Middle East conflict , alutista competition in South East Asian , and economic decelerating of Tiongkok have big influence on Australia foreign policy include Australia's Aid policy for Indonesia.*

**Keyword : Australia's aid , policy , fluktuation , Indonesia**

**Pendahuluan**

Perubahan geo ekonomi politik di kawasan Asia Pasifik dan keberadaan Australia dalam regional tersebut. Menjadikan fokus politik luar negeri Australia adalah kawasan Asia Pasifik. Perjalanan perpolitikan luar negeri Australia selalu menggunakan paham liberalis yang dianutnya. Politik luar negeri Australia di bidang ekonomi yang paling tampak adalah pelaksanaan *free trade area* dengan negara – negara partnernya. Pelaksanaan *free trade* memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Keinginan Australia untuk menjalin kerjasama *free trade area* dengan negara – negara di kawasan Asia Pasifik. Regional Asia Pasifik strategis dalam ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah , sumber daya manusia dengan gaji terjangkau serta pasar yang menjanjikan membuat Australia memiliki kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Akan tetapi , negara di kawasan ini mayoritas merupakan negara berkembang yang memiliki sarana dan prasarana yang tidak mencukupi dan masih menghambat pengaplikasian *free trade*. Seperti yang telah disinggulkan terdahulu bahwa ciri – ciri negara berkembang adalah

kemiskinan , keterbelakangan , tingkat partisipasi politik masyarakat yang rendah.<sup>1</sup> Permasalahan ini membuat Australia mengambil kebijakan bantuan luar negeri khususnya untuk Asia Pasifik. *Australia's Aid* distribusikan melalui *Departement Foreign Affair and Trade* dibawah tanggungjawab menteri luar negeri Australia. Terdapat sekitar 35 negara yang menerima bantuan luar negeri Australia dan mayoritas merupakan negara di kawasan Asia Pasifik. Salah satu negara yang menerima bantuan luar negeri Australia adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara tetangga terdekat dan mitra strategis. Walaupun demikian hubungan Australia – Indonesia kerap mengalami pasang surut hubungan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat ekonomi , nilai , norma dan *culture*. Ditengah hubungan yang tidak pasti , Australia setiap tahunnya tetap memberikan bantuan luar negerinya ke Indonesia, Rata – rata bantuan yang diberikan oleh Australia sekitar 500 juta dollar per tahunnya. Akan tetapi dalam kurun waktu empat tahun yakni tahun 2010 – 2014 terjadi perubahan kebijakan. Diantaranya adalah dari sektor jumlah bantuan luar negeri yang dikucurkan Australia ke Indonesia. Pada tahun anggaran 2010 hingga 2014 jumlah bantuan luar negeri Australia ke Indonesia mengalami fluktuasi.

Akan tetapi kuatnya ekonomi Australia dengan *free trade* nya ini tidak diikuti oleh negara – negara disekitar Australia yang notabene tergolong negara *development country* dan *underdevelopment country*. Mayoritas warga yang tinggal di kawasan ini hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga kualitas sumber daya manusianya pun kurang karena keterbatasan sarana dan prasarana. Faktor inilah yang membuat negara – negara tersebut sulit dalam menerapkan *free trade* secara total. Seperti yang telah kita ketahui , dalam *free trade* arus orang , barang dan jasa tidak mengalami hambatan. Ruang dan waktu seolah tidak ada , yang membuat arus ketiga komponen itu terus berjalan. Jika kualitas sumber daya manusia dan sarana –prasarana buruk maka ketiga komponen itu tidak dapat berjalan secara maksimal.

Hal ini yang melatarbelakangi pemerintah Australia memberikan bantuan luar negerinya ke negara di kawasan Asia Pasifik. Bantuan ini diberikan agar dapat merentas kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kepentingan nasional Australia dalam menjalankan *free trade* di kawasan Asia Pasifik dapat terlaksana. Salah satu penerima bantuan luar negeri Australia adalah Indonesia.

Pernyataan perdana menteri Australia kepada media tentang perubahan kebijakan bantuan luar negeri . Kevin Rudd , Julia Gillard dan Tony Abbott pada era pemerintahannya seringkali membuat pernyataan akan memangkas bantuan luar negerinya. Saat kepemimpinannya, Kevin Rudd berencana memangkas jumlah bantuan luar negeri senilai 879 juta dollar dari total keseluruhan bantuan Australia's Aid untuk 4 tahun kedepan. Di era kepemimpinan Tony Abbott mencanangkan akan mengurangi jumlah bantuan luar negeri untuk mengurangi nilai inflasi<sup>2</sup>. Pernyataan dari perdana menteri Australia berimplikasi pada kebijakan bantuan luar negeri, terutama bantuan

---

<sup>1</sup> Warsito Tulus . *Kapitalisme & Demokrasi* ( Yogyakarta , Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta & Lembaga Pengembangan , Pendidikan , Penelitian , dan Masyarakat ( LP3M ) UMY, 2010 ) halaman 59

<sup>2</sup> Yaxley Louise, Radia Australia 2003

## **Teori Pengambilan Keputusan William D. Coplin**

Pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari faktor – faktor dalam negeri dan internasional. Mengingat dasar pengambilan kebijakan adalah *national interest*. Negara yang merupakan abstraksi keinginan warga negara harus mampu mewujudkan *nasional interestnya*. Kebijakan politik luar negeri dianggap sebuah respon terhadap terhadap kepentingan nasional. Kondisi dalam negeri mencerminkan kestabilan politik – ekonomi militer sebuah negara yang nantinya akan mendukung politik luar negeri. Dalam relasinya dengan negara lain , sebuah negara memerlukan adanya dukungan dari ekonomi – militer untuk menjaga eksistensinya dalam panggung perpolitikan dunia. Kekuatan ekonomi dilihat dari segi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi sedangkan militer dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Kuantitas dapat dilihat melalui besarnya budget yang dikeluarkan pemerintah untk mendanai militernya. Budget yang tinggi , akan diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kualitas alustista. Penilaian kekuatan militer didasarkan pada jumlah pasukan , tingkat pelatihan , dan sifat perlengkapan militer.<sup>3</sup>Lingkungan internasional / konteks internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya dalam kaitannya degan negara – negara lain dalam sistem itu , dan juga hubungan ekonomi – politik antara negara itu dengan negara – negara lain.<sup>4</sup> Dalam hal ini interaksi antar negara mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dikarenakan adanya efek yang ditimbulkan dari permasalahan negara lain. Dengan menggunakan teori pengambilan keputusan William D Coplin akan dijelaskan faktor yang mempengaruhi proses perubahan kebijakan bantuan luar negeri Australia. Faktor konteks internasional mempunyai efek yang besar terhadap dua faktor lainnya yaitu faktor politik domestik dan faktor kondisi ekonomi – militer Australia.

Di dalam sebuah negara yang terdiri dari elit – elit politik / perumus kebijakan terdapat kepentingan bersama yang ingin dicapai dalam wadah sebuah negara. Elit – elit politik disini meliputi para pejabat yang menduduki kursi eksekutif , legislatif dan yudikatif. Kerjasama elit politik ditujukan untuk meyakinkan negara lain agar sesuai dengan kepentingan nasional dari negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik dalam negeri sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh sebuah negara , dalam hal ini kebijakan politik luar negeri. Secara operasional di dalam sebuah sistem politik terdapat policy influencers mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri. Policy influencers yaitu bureaucratic influencers , partisan influencers , interest influencers dan iklim opini. Bureaucratic influencers juga merupakan bagian dari policy makers. Oleh karena itu mereka mempunyai peran yang cukup diperhitungkan dalam pemberian informasi terkait pembuatan kebijakan dan bantuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Partisipant influencers dalam hal ini masih berhubungan dengan pihak bureaucratic. Karena partisipant mempunyai pengaruh cukup besar dalam memperkuar elit – elit bureaucratic karena pentingnya pemilihan umum. Akan tetapi dalam perumusan kebijakan luar negeri partisipant influencer terbatas oleh elit eksekutif. Karena elit eksekutif biasanya sebagai pengambil inisiatif sebuah kebijakan ,

---

<sup>3</sup> Morgenthau Hans, *Politic Among Nation* ( Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010 )

<sup>4</sup> Colplin William D , *Introduction to International Politics* diterjemahkan oleh Mercedes Marbun ( Bandung Penerbit CV Sinar Baru , 1992 )

tekanan – tekanan kepentingan nasional yang harus dipenuhi dan kerahasiaan lembaga. Interest influencers merupakan kelompok dari pihak – pihak yang berkepentingan atas kebijakan tersebut. Interest influencers antara lain MNC dan pemilik saham. Pengaruh mereka sangat diperhitungkan karena kemampuan finansial / dukungan publik mempengaruhi suara dalam pemilihan umum. Iklim opini / opini publik dewasa ini sangat mempengaruhi sebuah kebijakan. Opini publik yang negatif akan mempengaruhi angka dalam kurva kepuasan publik. Dan hal ini dapat mempengaruhi suara yang signifikan dalam sebuah pemilu.

Ekonomi sebuah negara menjadi tolak ukur kemampuan dalam menjalin hubungan internasional sebuah negara. Kapasitas ekonomi sebuah negara akan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Konteks internasional merupakan salah satu hal terpenting dalam pengambilan keputusan luar negeri suatu negara. Lingkungan internasional / konteks internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya , dalam kaitannya dengan negara – negara lain dalam sistem itu , dan juga hubungan – hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara – negara lain<sup>5</sup>

### **Kebijakan bantuan Luar Negeri Australia ke Indonesia**

*Australia's Aid* merupakan program dari pemerintah federal Australia untuk membantu negara – negara mitra agar terlepas dari kemiskinan , meningkatkan kemakmuran serta meningkatkan stabilitas khususnya di kawasan Indo Pasifik. *Australia's Aid* merupakan salah satu alat dari Pemerintah Australia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya di regional Indo Pasifik. Paham liberalis yang dianut oleh Australia , membawa negara tersebut ke dalam kebijakan liberal. Salah satunya dalam kebijakan ekonomi internasional Australia yang menggunakan *free trade*. *Free trade* dapat dilakukan oleh sebuah negara dengan negara partnernya apabila kedua negara tersebut memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi serta kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kenyataannya , negara – negara tetangga Australia di kawasan Indo Pasifik mayoritas tergolong ke dalam *development country* dan *underdevelopment country*. Hal ini lah yang memicu Australia untuk memberikan bantuan luar negeri Australia ke negara – negara tersebut. *The budget allocated to social pensions matter, both in terms of their aggregate size, because of potential tax disincentives and also in terms of the foregone opportunities to finance alternative programmes with greater impact on social welfare.*<sup>6</sup> Indonesia adalah satu diantara puluhan negara yang menerima *Australia's Aid*. Alasan diberikan bantuan *Australia's Aid* ke Indonesia pun beraneka ragam. Indonesia yang berada di depan pintu masuk Australia mempunyai peran strategis dalam geopolitik ekonomi Australia. Australia berada jauh dengan negara induknya Inggris dan mitra militer utamanya Amerika Serikat. Letak geografis yang jauh dengan kedua negara tersebut membuat pemerintah Australia khawatir jika suatu waktu Indonesia membuka wilayahnya untuk kerjasama militer dengan Tiongkok dan Rusia. Benteng pertahanan terakhir Australia adalah Indonesia terhadap kekuatan militer Tiongkok dan Rusia. Kedua negara tersebut merupakan rivalitas Amerika

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Armando Barrientos , Is There a Role for Social Pensions in Asia? Dalam jurnal Asia and the Pasifik Policy Studies , pages 1-209 , tahun 2014

Serikat dan sekutunya. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan non blok membuat Australia menaruh perhatian yang serius kepada Indonesia. Karena Indonesia cenderung bersifat fleksibel dalam membangun relasi internasional. Penghentian kerjasama antara Amerika , Uni eropa dan sekutunya dengan Rusia membuat Rusia mulai meningkatkan relasi dengan negara non barat yaitu negara kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia. Hubungan Rusia dengan Indonesia intens disebabkan adanya rencana jangka panjang ke dua negara untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ( PLTN ) di Indonesia. Hal ini , membuat kekhawatiran adanya aliansi militer Rusia dengan Indonesia. Oleh sebab itu , Australia menganggap pentingnya membangun kemitraan yang intens dengan Indonesia. Hubungan Australia dan Indonesia sering mengalami pasang surut hubungan sejak awal hubungan bilateral ini dibangun. Perbedaan yang tinggi , Indonesia sebagai negara berkembang dan Australia sebagai negara maju membuat seringnya perselisihan antara kedua negara.

Ditengah hubungan Indonesia – Australia yang tidak stabil terdapat Australia's Aid yang terus diberikan kepada Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara penerima bantuan Australia's Aid dari sekitar 35 negara penerima lainnya. Tahun 2010 / 2011 Indonesia menerima 458 juta dollar , sedangkan pada tahun 2011 / 2012 Indonesia mengalami peningkatan bantuan menjadi 558 juta dollar. Tahun 2012 / 2013 terjadi penurunan Australia's Aid ke Indonesia menjadi 472 juta dollar. Tahun 2013/ 2014 Indonesia kembali mengalami peningkatan bantuan menjadi 532 juta dollar. Selama empat tahun terus terjadi fluktuasi bantuan Australia.

Agar terwujudnya empat pilar tersebut, maka bantuan Australia's Aid didistribusikan ke 10 sektor yang luas yaitu kesehatan , pendidikan , transportasi , sanitasai – perairan , perlindungan sosial , perubahan iklim, pemerintahan , hukum , manajemen resiko bencana dan agribisnis. Dari total bantuan Australia's Aid secara keseluruhan ke Indonesia pada tahun 2011 sektor pendidikan menerima bantuan tertinggi yaitu 87,6 juta dollar Australia. Kemudian disusul oleh sektor transportartasi yang menerima bantuan 79,7 juta dollar Australia. Diposisi ketiga sektor pemerintahan yang menerima 57,5 juta dollar Australia. Sektor kesehatan menerima sekitar 37, 7 juta dollar Australia , sektor perubahan iklim 9,7 juta dollar Australia , sektor sanitasi dan perairan 7,4 juta dollar Australia. Perlindungan sosial menerima sekitar 40 juta dollar Australia , dan sektor hukum menerima 6,9 juta dollar Australia.

Program – program yang dilaksanakan Australia's Aid di Indonesia ; Di sektor pendidikan meningkatkan kinerja kepala sekolah sebanyak 595.000 orang , berkontribusi dalam BOS ( Biaya Operasional Sekolah ) dan beasiswa. Di sektor kesehatan , Austaralia's Aid menekan jumlah kematian ibu dan anak khususnya di Nusa Tenggara dan Papua serta pencegahan HIV AIDS. Dari sektor transportasi – konektivitas Australia's Aid berkontribusi dalam pembuatan jalan dan perbaikan jalan di Indonesia. Disektor sanitasi dan perairan, Australia's Aid berkontribusi untuk pengadaan instalasi PDAM di 32 provinsi dan peningkatan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Dari sektor pembangunan Australia's Aid telah membangun fasilitas – fasilitas publik seperti jembatan , sekolah , dan pusat kesehatan.

## **Faktor Konteks Internasional yang mempengaruhi Bantuan Australia ke Indonesia**

Dalam kasus ini faktor konteks internasional mempengaruhi faktor politik domestik serta kondisi ekonomi – militer Australia. Relasi Australia dengan dunia internasional berperan dominan dalam perubahan dua faktor tersebut. Terdapat tiga permasalahan internasional yang dihadapi oleh Australia yaitu konflik Timur Tengah , perlambatan ekonomi Tiongkok serta perlombaan alustista di kawasan Asia Tenggara.

### **Konflik Timur Tengah**

Wilayah Timur Tengah merupakan daerah konflik yang tak kunjung berakhir. Kekayaan akan sumber daya alam strategis , keanekaragaman ideologi agama dan kekuasaan menjadi tiga hal pokok yang menyebabkan konflik terus terjadi di kawasan tersebut. Dilihat dari keterlibatan dalam konflik Timur Tengah terdapat empat konflik yang diikuti oleh militer Australia.

Aksi terorisme di World Trade Center ( WTC , momentum perubahan kebijakan keamanan berbagai negara. Aktor dominan yang menyulut kebijakan anti terorisme ialah Amerika Serikat. Atas peristiwa pengeboman tersebut , Amerika Serikat melakukan operasi militer di Afghanistan. Tudingan Osama bin Leden sebagai pelaku teroris membuat Afghanistan menjadi lahan operasi militer Amerika Serikat. Dalam melakukan operasi dibantu oleh negara sekutunya dan Australia.

Konflik Suriah , konflik yang diakibatkan perbedaan ideologi dan politik. Konflik ini terjadi akibat adanya efek domino dari konflik terjadi di Tunisia , Mesir , Aljazair ,Irak dan Yaman. Hal ini memicu keinginan warga Suriah untuk melakukan revolusi. Kekuasaan Basyar Al Assad yang mencapai tiga dekade membuat kejenuhan dalam masyarakat. Dari aspek ideologi , walaupun keluarga Assad dan masyarakat menganut agama Islam. Keduanya memiliki perbedaan paham ideologi. Kelompok pemerintah menganut Syiah dan kelompok warga sipil menganut Sunni.<sup>7</sup>Adanya dugaan penggunaan senjata pemusnah masal dalam konflik internal Irak serta pelanggaran nilai – nilai demokrasi oleh Saddam Husein membuat Amerika Serikat turun tangan ke dalam konflik ini. Konflik internal hingga akhirnya terdapat keterlibatan asing dipicu oleh dua hal yang pertama keberadaan sumber daya alam strategis dan perbedaan aliran Sunni Syiah. Saat pemerintah Saddam , Amerika sulit mendapat akses untuk mendapatkan minyak di Irak sehingga hal ini juga menjadi alasan keterlibatan Amerika dan sekutunya. Keminoritasan Sunni dan posisi kuatnya di pemerintahan membuat sentimentas di kalangan Syiah yang notabene merupakan mayoritas penduduk Irak.

ISIL atau lebih sering dikenal dengan sebutan ISIS merupakan ancaman keamanan dan kestabilan politik di era modern. Kehadiran kelompok teroris ini , mengakibatkan konflik Timur Tengah sulit untuk mencapai titik akhir. ISIL beroperasi di Irak dan Suriah namun keanggotaan ISIL dari berbagai negara. Penggunaan internet yang makin canggih , membuat ISIL mudah dalam merekrut anggotanya.

---

<sup>7</sup> Pranissa, Nikita , Jurnal Ilmiah Non Seminar Universitas Indonesia : Aktor Besar dalam perang Suriah.

## **Alasan keterlibatan Australia dalam konflik Timur Tengah**

Politik luar negeri Australia selalu mengikuti arah politik luar negeri Inggris yang menjadi induk dari negaranya. Inggris merupakan salah satu pendiri NATO dan ikut terlibat operasi militer di Timur Tengah karena merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Australia sendiri notabene bukan negara anggota NATO namun keterlibatan Inggris dalam operasi tersebut, menjadi salah satu alasan keterlibatan militer Australia dalam konflik tersebut.

Pasca terjadi pengeboman di Indonesia yang menewaskan mayoritas korban warga Australia. Dugaan keterlibatan teroris jaringan Timur Tengah menimbulkan reaksi politik luar negeri Australia yaitu *war of terrorism*. Salah satu caranya dengan ikut terlibat dalam operasi militer di Timur Tengah. Mobilitas penduduk Australia yang tinggi ke berbagai negara membuat Australia mengkhawatirkan keselamatan dan keamanan warga negaranya.

Isu pencari suaka merupakan isu utama dalam perpolitikan luar negeri Australia. Dari era kepemimpinan Kevin Rudd, Julia Gillard hingga Tony Abbott kebijakan politik luar negeri Australia selalu membahas tentang pencari suaka. Pemikiran bahwa Australia merupakan negara yang makmur dan bebas dari konflik mengakibatkan para pencari suaka ini terus berusaha untuk mendapatkan suaka di Australia. Permasalahannya mayoritas dari para pencari suaka ini tidak memiliki *skill* yang dituntut oleh Pemerintah Australia dan hal ini akan membuat jumlah pengangguran di Australia meningkat yang berakibat pada jumlah bantuan sosial yang dibelanjakan. Pemerintah Australia menolak para pencari suaka tersebut, namun keinginan dari para pencari suaka tersebut tinggi sehingga membuat mereka menempuh jalur ilegal dengan cara menyewa perahu untuk menuju Australia. Dari tahun 2010 hingga 2013 jumlah perahu yang tiba ke Australia selalu meningkat. Tahun 2011, Australia menerima perahu sebanyak 69 perahu dengan angkutan penumpang sebanyak 4.565.<sup>8</sup> Peningkatan ini terus terjadi. Puncaknya pada tahun 2012, dimana perahu yang berjumlah 278 mengangkut sebanyak 17.202 penumpang.<sup>9</sup> Jumlah manusia perahu yang datang ke Australia yang terus meningkat membuat Australia harus terlibat dalam konflik Timur Tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut.

## **Perlombaan Alustista dikawasan Asia Tenggara**

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia dikarenakan geopolitik dan ekonomi strategisnya. Disisi ekonomi, Asia Tenggara merupakan pasar yang menjanjikan untuk investor dari Australia, Eropa, Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dikawasan ini mengakibatkan negara – negara ini mulai tertarik terhadap alustista. *The Asia Pasific region had experience a sustainble build up of modern conventional weapons systems for better part of a decade.*<sup>10</sup> Sehingga pembelian alustista di kawasan ini semakin tinggi. Alasan

---

<sup>8</sup> Departemen Imigrasi Australia yang dikutip oleh BBC Indonesia 2013

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Ball, Desmond, Arms and Affluence; Military Acquisitions in the Asia Pasifik Region dalam *Journal International Security* Volume 18 no 13 ( Winter 1993 -1994 ) page 78 -112 (Harvard MIT Press )

yang menguatkan negara – negara ini membeli alustista adalah untuk menjamin keamanan negaranya. Asia Tenggara mempunyai intensitas konflik yang tinggi. Dari konflik etnis hingga konflik perebutan teritorial. Kasus yang menjadi sorotan dunia , perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Perebutan ini melibatkan aktor negara besar yaitu Tiongkok. Tiongkok menempati peringkat ke 3 dari 106 negara dengan 2.333.000 personel aktif dan active military reserves 2.300.000.<sup>11</sup> Penting untuk membangun kekuatan militer internal dalam mengantisipasi ancaman Tiongkok.

### **Perlambatan ekonomi Tiongkok**

Tiongkok adalah negara di Asia dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi rivalitas ekonomi Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi Tiongkok dikarenakan kebijakan ekonominya menggunakan paham liberalis dengan cara penggunaan free trade are dengan negara mitra kerjasamanya. Akan tetapi , kurun waktu terakhir Tiongkok mengalami perlambatan ekonomi. Menurut Louis Kuijs, analis *Oxford Economics* di Hong Kong. Perlambatan ekonomi Tiongkok terjadi karena tekanan lanjutan dari real estate dan ekspor disebabkan Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 6,9 persen.<sup>12</sup> Tidak hanya dari segi Produk Domestik Bruto (PDB). Dampak dari fluktuasi pasar saham dan devaluasi mata uang.<sup>13</sup> Kedua hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok terhambat. Pada tahun 2013, perekonomian China tumbuh sebesar 7,7 persen, tingkat terburuk sejak 1999.<sup>14</sup> Sehingga menimbulkan dampak kepada negara – negara mitranya.

Australia menerima dampak terbesar akibat perlambatan ekonomi Tiongkok. Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Australia saling bergantung. Australia yang kaya akan sumber daya alam strategis, mengekspor batu bara dan besi ke Tiongkok. 30 % ekspor barang pertambangan Australia dengan tujuan Tiongkok. Tahun 2013 , nilai total ekspor Australia ke Tiongkok menurun dari tahun 2012. Nilai ekspor Australia dibawah 80.000 million dollar Australia. Hal ini berdampak pada sektor penerimaan pendapatan nasional Australia dari sektor pertambangan yang menurun. Efek domino ekonomi lanjutannya adalah peningkatan angka bantuan sosial yang diberikan kepada warga negaranya akibat warganya menganggur dan berkurangnya sektor pendapatan dari pajak pertambangan. Akibatnya pemerintah Australia mengubah alokasi anggaran belanjanya.

---

<sup>11</sup> <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=china&country2=united-states-of-america&Submit=COMPARE> aksse 10 Desember 2015

<sup>12</sup> Inriana , Irene CNN Indonesia dalam artikel Ekonomi China stabil di akhir tahun asal pangkas suku bunga <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151019154455-78-85843/ekonomi-china-stabil-di-akhir-tahun-asal-pangkas-suku-bunga/> tanggal akses 16 November 2015

<sup>13</sup> Clark , Helen The Diplomats dalam artikel China and Australia its the economy stupid <http://thedi diplomat.com/2015/08/china-and-australia-its-the-economy-stupid/> tanggal akses 30 Oktober 2015

<sup>14</sup> Springfield, Cary dalam artikel The impacat of China's economic slowdown on comodities markets <http://internationalbanker.com/brokerage/the-impact-of-chinas-economic-slowdown-on-commodities-markets/> tanggal akses 30 Agustus 2015



## **Tanggapan Australia terhadap Faktor Konteks Internasional**

Dari upaya – upaya yang dilakukan oleh Australia dalam merespon konflik Timur Tengah , perlombaan alutista di kawasan Asia Tenggara dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Dari sisi ekonomi , Australia yang mengalami dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok dengan turunnya pendapatan dari sektor pertambangan yang berakibat naiknya bantuan sosial kepada masyarakat Australia ( terutama yang menganggur ) dan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini mengakibatkan jumlah pemasukan lebih sedikit daripada pemasukan. Pemasukan terbesar Australia berada pada sektor perdagangan ekspor – import tambang ( batu bara , emas )

Banyak pencari suaka yang menjadi bahan tanggungan berat pada ekonomi dalam negeri Australia dan juga tanggungan Australia terhadap para pencari suaka yang diungsikan ke Nauru , Papua Nugini dan Timor Leste. Sehingga dalam hal ini terjadi perubahan fokus ekonomi Australia menjadi penyelamatan kondisi ekonomi masyarakat Australia dan terhadap para pencari suaka yang diungsikan ketiga negara tersebut. Dari sisi kemampuan militer , Australia meningkatkan kapasitas militer pada tahun 2012 – 2013. Walaupun , Australia mengalami penurunan alokasi anggaran militer pada tahun 2011 - 2012 dan kemudian pada tahun 2013 Australia menaikkan anggaran militernya.

Dari tahun 2010 , saat pemerintahan Kevin Rudd alokasi belanja militer berkisar 1,74 % presentasinya dari pendapatan nasional Australia. Pada era kepemimpinan Julia Gillard tahun 2011 , anggaran militer Australia mengalami 0,04 persen kenaikan hal ini dipicu karena kenaikan PDB Australia. Tahun 2012 , dimana partai Buruh masih berkuasa sebagai perdana menteri , anggaran militer mengalami penurunan menjadi 1,60 % dari total PDB. Penurunan ini dikarenakan kondisi ekonomi Australia pada waktu tersebut sedang memburuk. Karena sektor penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami penurunan pendapatan sedangkan angka bantuan sosial tinggi seiring dengan peningkatannya pengangguran. Ditambah lagi permasalahan pencari suaka ilegal yang ditempatkan di Nauru , Papua Nugini dan Timor Leste. Penerimaan pendapatan lebih sedikit daripada pengeluaran. Hal ini memicu Australia untuk melakukan penghematan anggaran. Beranjak pada tahun anggaran 2012 - 2013 pemerintah Australia merespon konteks internasional dengan menaikkan anggaran militer Australia ditengah keadaan ekonomi Australia yang tidak stabil. Pada tahun 2013 , terjadi kenaikan anggaran militer sebesar 1,71 % . Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 , terdapat 3 perdana menteri secara bergantian mengisi kursi perdana menteri Australia. Dilihat dari segi politik domestik , terjadi perbedaan prespektif antar partai di Australia. Khususnya Partai Buruh dan Partai Liberal dalam merespon konflik Timur Tengah , dan perlombaan alutista di kawasan Asia Tenggara , dan perlambatan ekonomi Tiongkok Dari tiga perdana menteri , terdapat Kevin Rudd dan Julia Gillard yang berasal dari partai Buruh , dan Tony Abbott yang berasal dari partai Liberal. Hal ini mengakibatkan perbedaan arah kebijakan decision makers yang terdiri dari perdana menteri Australia , Departement Foreign Affairs and Trade Australia Government , dan Parlemen. Partai Buruh cenderung merespon faktor konteks internasional dengan penyelamatan kondisi dalam negeri Australia dengan kebijakan sosialnya yaitu peningkatan kesejahteraan pada Buruh sedangkan partai Liberal lebih ke arah kebijakan militer sebagai bentuk

penciptaan kondisi regional yang aman dan stabil sehingga dapat menjalankan free trade. Penyebab terjadinya perbedaan yang kontras antara partai Buruh dan partai Liberal dikarenakan ideologi partai yang berbeda. Kenaikan anggaran dipicu karena banyak operasi militer yang dilakukan pasukan militer Australia pada tahun 2013 seperti operasi militer di Timur Tengah dan juga rencana pembelian alutista

### **Faktor Politik Domestik dan Kondisi Ekonomi – Militer Australia yang mempengaruhi bantuan Australia ke Indonesia**

Australia mengantuk sistem *monarchi* konstitusional, negara federasi , dan representative dari democracy ; konstitusi ini yang menyediakan dasar pembuatan kebijakan hukum dan undang , ratu dan sistem federal.<sup>15</sup> *Federal system* menggunakan *bicameral* sistem. Dalam *bicameral system* terdapat *upper house* dan *lower house*. Karena kedemokrasiannya , sistem ini sering kali mengadakan musyawarah / rapat untuk mengambil kebijakan akan tetapi biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada sistem satu kamar karena seringkali dalam musyawarah tersebut mengalami *dead lock* . *Dead lock* disebabkan sulit menemukan jalur tengah antara dua majelis tersebut.

Dalam penggunaan sistem parlementer , Australia mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungannya pertama , Australia cepat dalam pembuatan undang – undang karena eksekutif juga merupakan bagian dari legislatif .Kursi legislatif diduduki oleh mayoritas partai pemenang pemilu , sehingga mempermudah pembuatan kebijakan Perdana Menteri yang sesuai dengan visi dan misi partainya. Yang kedua , kurun waktu tiga tahun masa jabatan Perdana Menteri Australia. Perdana Menteri dapat dilengserkan apabila kebijakannya dinilai buruk sebelum masa jabatannya berakhir.

Di Australia terdapat dua partai besar yang berkuasa yaitu partai Buruh dan partai Liberal. Partai liberal sesuai dengan namanya berpaham liberal. Partai Liberal merupakan partai sayap tengah. Tujuan terbentuknya partai ini adalah menciptakan kebebasan kepada individu terutama kebebasan dalam politik. Partai Buruh merupakan partai tertua di Australia. Partai ini berideologikan sosialisme demokratis dan termasuk partai sayap kiri. Partai buruh dalam tujuan pendirian partai menginginkan ekonomi Australia yang berdasarkan liberalis demokratis. Prioritas partai Buruh adalah kebijakan ekonomi fiskal ,menyetabilkan kebijakan moneter , jaminan pensiun bagi para buruh, memaksimalkan peran sektor makro – mikro serta kebijakan perdagangan internasional

Prespektif partai Liberal tertuang pada kebijakan – kebijakan yang diambil oleh perdana menterinya. Dimana partai Liberal lebih berfokus kepada penciptaan free trade area dengan cara menyetabilkan keamanan regional pada khususnya. Agar free trade dapat dijalankan Australia dengan negara – negara disekitarnya. Seperti yang telah diketahui dalam sistem parlementer yang dianut oleh Australia. Partai pemenang pemilu berhak menduduki kursi perdana menteri. Perdana menteri tidak dipilih langsung oleh partai bukan oleh rakyat. Dalam sistem ini juga , perdana menteri dapat dilengserkan oleh parlemen jika parlemen menginginkan percepatan pemilu. Sehingga kebijakan perdana menteri harus menyimbolkan dan meresrepresentivekan partai. Agar partai tetap

---

<sup>15</sup> The Government of Australia ; The Australian Parliamentary System , hal 1-34

mendukung kekuasaan perdana menteri dan bukan malah menyerang dengan cara pelengseraan.

Partai Liberal menempatkan Tony Abbott sebagai perdana menteri di Australia dengan periode jabatan 2013 – 2015. Dalam merespon konflik Timur Tengah , perlombaan alutista di kawasan Timur Tengah dan perlambatan Ekonomi Tiongkok. Partai Liberal menekan pada pentingnya pertahanan dan keamanan Australia. Hal ini terlihat dimana ditengah perlambatan ekonomi Tiongkok yang mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan nasional dari sektor pertambangan. Tony Abbott justru melakukan pengeluaran anggaran militer yang meningkat lebih dari Partai Buruh. Anggaran militer dipergunakan untuk operasi militer di Timur Tengah dan juga operasi kedaulatan untuk menghalau perahu dari para pencari suaka dan imigran gelap. Dalam proses sistem policy influence menggunakan bidang isu. Partai Liberal memfokuskan isu keamanan nasional Australia dimana isu yang dimainkan disini adalah isu terorisme dan instabilitas kawasan Asia Tenggara dikarenakan perlombaan alutista , yang kedua adalah isu berkaitan lemahnya ekonomi Australia akibat perlambatan ekonomi Tiongkok sehingga sudah saatnya Australia mengurangi beban yang bukan menjadi beban wajibnya hal ini berkaitan dengan beban bantuan sosial untuk para pencari suaka ilegal dan imigran gelap. Kebijakan penampungan para pencari suaka dan imigran gelap di Papua Nugini , Timor Leste dan Nauru yang dilakukan oleh partai Buruh dianggap sebagai sebuah beban baru untuk Australia. Karena sama saja Australia harus membayar 2 kali yakni kepada negara penampungan dan juga kepada para pencari suaka ilegal. Dalam kebijakan bantuan sosial di Australia pun Partai Liberal masih berfokus kan kepada keamaan nasional. Terlihat dalam pembuatan kebijakan penolakan pembayaran tunjangan kesejahteraan sosial bagi yang dianggap sebagai ancaman. Adanya kecurigaan partai Liberal terhadap warga negaranya yang berada di Timur Tengah dan dugaan keterlibatan dengan ISIL. Hal inilah yang memperkuat Tony Abbott dari Partai Liberal dalam melatar belakangi naiknya anggaran militer Australia dan juga mengubah kebijakan pemberian bantuan Australia ke Indonesia.

Partai Buruh merupakan partai tertua di Australia. Partai ini berideologikan sosialisme demokratis dan termasuk partai sayap kiri. Partai buruh dalam tujuan pendirian partai menginginkan ekonomi Australia yang berdasarkan liberalis demokratis. Prioritas partai Buruh adalah kebijakan ekonomi fiskal ,menyetabilkan kebijakan moneter , jaminan pensiun bagi para buruh, memaksimalkan peran sektor makro – mikro serta kebijakan perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan para pencari suaka , partai Buruh mempunyai kebijakan White Australia Policy. Kebijakan yang melarang imigran non Eropa datang dan tinggal di Australia. Kebijakan ini untuk tetap memurnikan ras Eropa di Australia.

Dalam kurun waktu empat tahun yakni 2010 hingga 2014. Partai Buruh 3 kali periode menduduki kursi perdana menteri Australia yakni Kevin Rudd periode I , Julia Gillard dan Kevin Rudd periode II. Dalam tiga kali periode masa jabatan. Prespektif fokus Partai Buruh dalam merespon konflik Timur Tengah ,perlombaan alutista di kawasan Asia Tenggara dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Partai Buruh terlihat lebih memfokuskan ke arah pengamanan kondisi ekonomi masyarakat Australia. Kondisi ekonomi yang buruk akibat menurunnya permintaan ekspor batu bara dan emas ke

Tiongkok pada tahun 2012 - 2013. Mengakibatkan angka pengangguran di Australia naik. Sehingga kebijakan Kevin Rudd dan Julia Gillard fokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan bantuan sosial, bantuan pendidikan, jaminan hari tua dan bantuan kesehatan. Hal ini dikarenakan Partai buruh memenangkan pemilu karena adanya kepercayaan dari masyarakat berupa keyakinan akan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat Australia.

Pada era Julia Gillard bantuan sosial untuk masyarakat Australia terus ditingkatkan akan tetapi anggaran militer dipotong. Dalam penanganan para pencari suaka ilegal dan manusia perahu partai Liberal justru melibatkan negara – negara Pasifik seperti Nauru, Papua Nugini dan Timor Leste untuk menampung mereka. Bagi partai Buruh, hal ini dapat mengurangi angka anggaran militer Australia untuk menangani kasus tersebut dengan operasi di perbatasan. Anggaran militer pada waktu itu difokuskan untuk operasi militer di Timur Tengah. Karena penempatan tersebut sudah berarti melimpah permasalahan para pencari suaka ke pihak negara ketiga. Citra Partai Buruh dalam merespon konteks internasional adalah menomor satukan kepentingan nasional Australia yaitu kepentingan warga negara Australia dengan perbaikan kehidupan warga Australia melalui bantuan sosial.

Sedangkan di era Tony Abbot kebijakan luar negeri Australia lebih tegas dibandingkan dengan era kepemimpinan Julia Gillard dan Kevin Rudd. Tony Abbott mempunyai kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Dengan cara menghalau perahu yang mengangkut para pencari suaka menuju Australia. Di bawah kepemimpinannya anggaran militer Australia naik sebesar 2 % dari total GDP Australia. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Perdana Menteri dari Partai Buruh yang justru mengurangi sektor anggaran militer.

Dari sisi ekonomi, dengan meningkatnya konflik Timur Tengah dari tahun ke tahun membuat Australia mengalami kenaikan permintaan suaka dan manusia perahu ke Australia. Australia yang berada jauh dari konflik Timur Tengah dan klasifikasi Australia sebagai negara maju, membuat warga Timur Tengah ingin tinggal di Australia. Hal ini mempengaruhi kenaikan bantuan sosial khususnya untuk penanganan para pencari suaka dan keterlibatan militer Australia di konflik Timur Tengah juga memberatkan anggaran belanja negara ditengah krisis perlambatan ekonomi Tiongkok.

Perlambatan ekonomi Tiongkok membuat nilai ekspor Australia jatuh. Tiongkok yang merupakan mitra terbesar perdagangan Australia mengurangi jumlah permintaan emas, bijih besi dan batu bara. Selama ini pertumbuhan ekonomi ke dua negara ini saling tolong menolong. Australia sangat mengandalkan sektor pertambangan dalam sumber pendapatannya. Pasar ekspor Australia juga berdampak pada peningkatan pengangguran karena banyaknya PHK. Bantuan sosial untuk warga Australia yang menganggur dan untuk para pencari suaka pun naik sedangkan dari sektor penerimaan berupa pajak dan ekspor berkurang.

Perlombaan alustista di kawasan Asia Tenggara dan konflik Timur Tengah membuat Australia merespon dengan menaikkan anggaran militernya. Anggaran militer ini digunakan untuk perbaikan kualitas dan kuantitas militer Australia. Australia sebagai *representative* dari negara barat terutama Amerika Serikat menginginkan hegemoni

yang besar di kawasan Asia Tenggara serta untuk keberhasilan misinya di Afghanistan. Tony Abbott selama masa jabatannya sebagai perdana menteri telah membeli alutista. Pembelian kapal selam kelas Soryu senilai USD 25 milyar untuk 12 kapal selam. Kelebihan kapal selam ini adalah dapat menyelam selama kurang lebih 2 minggu lamanya , memiliki jarak jangkau 6.100 mil laut. Adanya teknologi anehocic membuat kapal selam ini sulit untuk dijangkau oleh radar. Pemerintah Australia membeli 58 unit lebih pesawat F-35 Joint Strike Fighters

### **Kesimpulan**

Bantuan luar negeri Australia ke Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2010 – 2014 diakibatkan oleh efek yang diciptakan oleh faktor konteks internasional yang direspon oleh Pemerintah Australia yaitu konflik Timur Tengah , perlombaan alutista di kawasan Asia Tenggara dan Perlambatan ekonomi Tiongkok. Ketiga permasalahan tersebut mempengaruhi faktor politik domestik dan kondisi ekonomi – militer Australia dan juga mempengaruhi prespektif partai Buruh dan partai Liberal. Yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan kebijakan bantuan luar negeri Australia ke Indonesia tahun 2010 – 2014 . Puncaknya pada tahun 2012 -2013 mengalami perubahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Armandhanu, D., & Dewi, S. (2013, September 9). *VIVA NEWS*. Retrieved Oktober 10, 2015, from <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/442626-berhemat--tony-abbott-berencana-potong-bantuan-luar-negeri>
- Australia, T. G. (n.d.). *The Australian Parliamentary System* . Canberra: The Government of Australia .
- Ball, D. (1994). Arms and Affluence ; Military Acquisitions in the Asia Pasifik Region. *International Security Volume 18 no 13*, 78- 112.
- Barrientos, A. (2014). Is There a Role for Social Pensions in Asia? *IA Asia and the Pasifik Policy Studies*, 1-209.
- BBC Indonesia*. (n.d.). Retrieved Desember 8, 2015, from <http://bbc.indonesia.com>
- Clark, H. (2015, Agustus). *The Diplomat*. Retrieved Agustus 30, 2015, from <http://thediplomat.com/2015/08/china-and-australia-its-the-economy-stupid/>
- Coplin, W. D. (1992). *Introduction to International Politics* . Bandung: CV Sinar Baru.
- Global Fire Power*. (n.d.). Retrieved Desember 8, 2015, from <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=china&country2=united-states-of-america&Submit=COMPARE>
- Holmes, & Fernandes. (2012). *Federal Election : A Brief History of Parliament of Australia* . Canberra: Australia Library.
- Inriana, I. (n.d.). Retrieved November 16, 2015, from CNN Indonesia : <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151019154455-78-85843/ekonomi-china-stabil-di-akhir-tahun-asal-pangkas-suku-bunga/>
- Morgenthau, H. (2010). *Politik Among Nation*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Pranissa, N. (n.d.). Aktor Besar dalam perang Suriah. *Jurnal Ilmiah Non Seminar Universitas Indonesia* .
- Springfield, C. (n.d.). *International Banker* . Retrieved Desember 8, 2015, from <http://internationalbanker.com/brokerage/the-impact-of-chinas-economic-slowdown-on-commodities-markets>
- Warsito, T. (2010). *Kapitalisme & Demokrasi* . Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta & Lembaga Pengembangan , Pendidikan & Masyarakat ( LP3M ) UMY.

White, H. (2008). *Capturing The Year 2008 Writings* . Canberra: the ANU College of Asia and the Pacific .

Yaxley, L. (2013, Agustus 3). *Radio Australia*. Retrieved Oktober 20, 2015, from <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-08-03/pemilu-federal-australia-mungkin-7-september/1170644>

